

**Sketsa Bisnis Volume (6) No (2) (2019) pp (77-86)**



**SKETSA BISNIS**

Naskah Diterima : 20 Oktober 2019  
Diterima Publikasi : 10 Desember 2019

Journal Homepage

<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>



**Citizen's Participation Level Analysis Dalam Pengelolaan Dana Desa  
di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari**

**Aminullah<sup>1</sup>, Aslikha<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, FISIP Universitas Yudharta Pasuruan

<sup>2</sup>Ekonomi Syariah, FAI Universitas Yudharta Pasuruan

**Abstract**

In the implementation of Village Fund Management, the Village Government cannot be separated from the role of Participation and the Village community as one of the stakeholders. Community participation is needed in the management of village funds as a form of transparency and accountability aspects that are a reference of the village funds themselves. The purpose of this study was to analyze the degree of community participation in the management of Sukodermo Village Fund, Purwosari Subdistrict, Pasuruan Regency, and the impacts arising from community participation in the management of Village funds. The research method in this study is a qualitative method. The results showed that community participation in the implementation of Sukodermo Village Fund Purwosari Subdistrict Pasuruan Regency was divided into 3 main focuses, namely: first, the level of community participation in the process of village fund management planning, second, the level of community participation in the implementation of village fund management, third, the level of community participation in Evaluation of fund management.

**Keywords:** *Society Participation, Implementation, Public Policy, Village Fund*

**Abstrak**

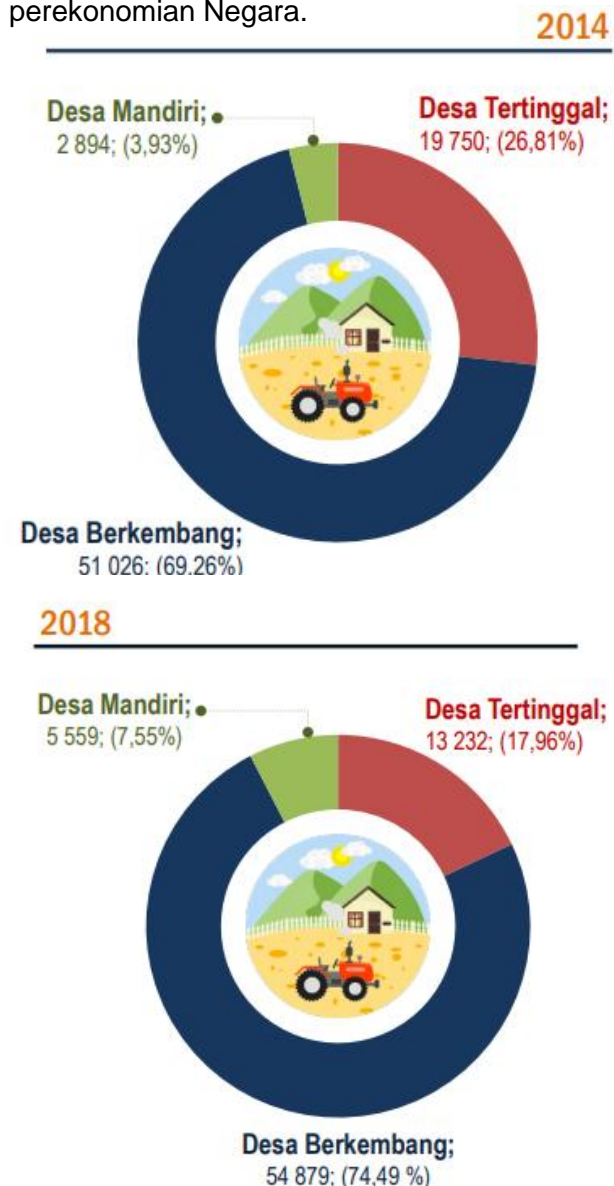
Dalam implementasi Pengelolaan dana Desa, Pemerintahan Desa tidak bisa lepas dari peran Partisipasi serta masyarakat Desa sebagai salah satu *stakeholders*. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana Desa sebagai bentuk aspek transparansi dan akuntabilitas yang menjadi acuan dari dana Desa itu sendiri. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis derajat partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan dana Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, serta dampak yang muncul akibat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana Desa tersebut. Metode Penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Implementasi dana Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan terbagi dalam 3 fokus utama yakni: pertama, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pengelolaan dana Desa, Kedua, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa, Ketiga, Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pengelolaan dana.

**Kata Kunci:** Partisipasi Masyarakat, Implementasi, kebijakan Publik, Dana Desa

\*) Aminullah: aminullahmajid@gmail.com

## 1. Pendahuluan

Pembangunan Desa merupakan salah satu tantangan penting untuk meningkatkan potensi dan kualitas Desa dari level tertinggal, berkembang menuju Desa mandiri, hal ini dikarenakan jumlah prosentase desa tertinggal dan berkembang di Indonesia masih mendominasi, sehingga pengelolaan pembangunan desa yang baik pada akhirnya turut memperbaiki kesejahteraan dan perekonomian Negara.



Sumber: <sup>1</sup>Berita Resmi Statistik, BPS, 2018  
<sup>2</sup>Status IPD, 2014–2018

**Gambar 1. Jumlah Desa Menurut Status IPD, 2014–2018**

Permasalahan kompleks yang ada pada pembangunan Desa mengandung makna bahwasannya didalam pembangunan desa itu terdapat keterlibatan banyak *stakeholders*. Pemerintah menempatkan pembangunan desa menjadi salah satu prioritas kinerjanya untuk mewujudkan pembangunan nasional. Oleh sebab itu pembangunan desa bukan menjadi tanggung jawab satu pihak, akan tetapi keterlibatan *stakeholders* desa diharapkan bisa bekerjasama dan berkoordinasi demi terwujudnya pembangunan desa sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

Arah serta sasaran dari pembangunan desa meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, dalam arti pelibatan komponen-komponen dari pihak masyarakat dan pemerintah serta komponen lain yang berhubungan dengan desa menjadi satu kesatuan organ yang secara terus menerus bekerjasama demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa dan mengurangi angka kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang ini dijelaskan pada ketentuan umum bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan Desa, dengan pelibatan partisipasi masyarakat diharapkan akan terjadi komunikasi yang

harmonis antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat. Dana Desa yang merupakan sumber pendapatan Desa yang berasal dari APBN yang merupakan salah satu Program Pemerintahan Pusat guna mempercepat pembangunan secara Nasional.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat dibutuhkan guna mempertajam program pembangunan Desa, sehingga pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa bisa tepat sasaran. Dalam kaitannya dengan Program Dana Desa, dibutuhkan analisis Partisipasi Masyarakat agar Masyarakat tidak hanya dilibatkan dalam hal pembuatan kebijakan kan tetapi juga dalam pelaksanaan program serta pengawasannya.

Desa Sukodermo merupakan salah satu dari sekian Desa yang berada dalam wilayah Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat bervariasi dalam hal intensitas dan bentuk partisipasinya, dibutuhkan analisis derajat partisipasi masyarakat guna mengetahui sejauhmana keterlibatan masyarakat dan dampak yang terjadi dari keterlibatan masyarakat tersebut.

## 2. Kerangka Teori

### 2.1 Konsep Partisipasi

Untuk menilai derajat partisipasi masyarakat, penelitian ini juga menggunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on Ladder of Citizen Participation*) menurut teori Sherry (Arnstein, 1971). Dalam konsepnya, Arnstein menjelaskan "partisipasi masyarakat yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan corresponding to the extent of citizen's power in determining the plan and/or program". Secara umum dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat, yakni:

- a. Tidak Partisipatif (*Non Participation*)
- b. Derajat Semu (*Degrees of Tokenism*)
- c. Kekuatan Masyarakat (*Degrees of*

### *Citizen Powers*)

Penelitian ini akan mengungkap level atau derajat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, maka dalam penelitian ini akan berlandaskan pada tangga partisipasi Arnstein, sehingga derajat partisipasi masyarakat akan lebih jelas diketahui levelnya.

Dalam tangga partisipasi, para praktisi umumnya menerima konsep bahwa manipulasi pada dasarnya bukanlah partisipasi. Penentruman, informasi, dan konsultasi pada dasarnya adalah bentuk lain dari tokenisme yaitu kebijakan sekedarnya berupa upaya superfisial (dangkal, pada permukaan) atau tindakan simbolis dalam pencapaian suatu tujuan. Sedangkan kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan pengawasan oleh warga diterima sebagai wujud dari kekuasaan dan partisipasi warga.

Para praktisi juga umumnya menerima bahwa tangga yang lebih tinggi merupakan wujud dari kualitas partisipasi yang lebih tinggi. Tetapi para praktisi juga dapat menerima bentuk partisipasi yang lebih rendah dalam situasi sosial politik sejauh bentuk tersebut merupakan salah satu strategi untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.

### 2.2 Konsep Desa

Secara etimologi kata "desa" berasal dari Bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai "a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town". Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan menurut (Widjaja, 2003) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat. kata “desa” juga berasal dari bahasa india, yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang menunjuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas-batas yang jelas (Yulianti, 2003:24).

### 2.3 Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa merupakan suatu kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan perangkat desa. Pemerintahan Desa menurut (Widjaja, 2003:3) dalam bukunya “Otonomi Desa” pemerintahan desa diartikan sebagai: Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus.

### 2.4 Dana Desa

Desa memiliki otonomi untuk menjalankan sendiri kegiatan pemerintahannya, yang tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2015 dijelaskan bahwa pendapatan sumber keuangan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa (Hasil Kekayaan Desa, Hasil Swadaya Masyarakat, Pungutan, Gotong Royong) Pembagian Pajak dan Retribusi Kabupaten; Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Kabupaten atau Alokasi Dana Desa; Hibah keuangan dari pemerintah provinsi dan kabupaten; Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat. Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: 1) Desa memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula; 2) Kesenjajahan masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa

mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi; 3) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan publik; 4) Banyak program pembangunan masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya (Putra *et al.* 2013).

Menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah memberi dukungan keuangan kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10 persen diperuntukkan bagi desa yang disebut dana Desa. Maksud pemberian dana Desa sebenarnya adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat

## 3. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Manfaat menggunakan pendekatan studi kasus ini akan mempermudah peneliti dalam pengambilan fokus penelitian dan bisa mengungkap secara mendalam berdasar pada fokus yang dituju. Metode kualitatif dalam hal ini memiliki tujuan untuk menggambarkan dan mengungkapkan (*to describe and explore*) serta untuk menggambarkan dan menjelaskan (*To describe and explain*) (Albi & Johan, 2018) Lokasi Penelitian dalam Penelitian ini yakni Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, berikut beberapa pertimbangan pemilihan lokasi penelitian: Terdapat format kebijakan Dana Desa di Desa Sukodermo, Diduga tingkat partisipasi masyarakat sangat lemah. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Literatur  
Studi literatur pada UU. No 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendes, Permendagri, Peraturan Menteri Keuangan
2. Observasi lapangan  
Observasi dilakukan di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari. Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi keadaan lapangan awal agar mempertajam pertanyaan dalam wawancara sehingga hasil yang diperoleh dari wawancara akan lebih akurat
3. Wawancara mendalam  
Wawancara akan dilakukan dengan memanfaatkan informasi dari *key informan* terutama kepada Kepala Desa Sukodermo, Kepala BPD Desa Sukodermo dan Perangkat Desa yang sehari-harinya melakukan koordinasi terkait pengelolaan Dana Desa, dengan metode *focus group discussion* yang dilakukan 2 sesi (Rakhmawati, Nizar, Rahardjo, 2019) Berbagai pertanyaan dilakukan antara lain terkait kerjasama dan intensitas pertemuan, komunikasi, dan interaksi dengan pejabat setingkat di Desa Sukodermo.

#### 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setiap praktik partisipasi dalam berbagai kegiatan memiliki prosentase yang berbeda. Prosentase ini dimaksudkan jika dibandingkan satu dengan yang lainnya akan membentuk suatu garis kontinum mulai dari titik non partisipasi masyarakat sampai kendali masyarakat sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan bukan partisipasi dalam penelitian ini akan mempergunakan konsep delapan tangga partisipasi masyarakat menurut Sherry R Arnstein dalam (Wicaksono, 2013) membagi jenjang partisipasi masyarakat terhadap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam delapan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat terkenal dimana berdasarkan kekuasaan yang

diberikan kepada Masyarakat. Diantaranya yakni:

1. *Citizen control*; masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan.
  2. *Delegated power*; pada tingkatan ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tertentu.
  3. *Partnership*; masyarakat berhak berunding dengan pengambil keputusan atau pemerintah, atas kesepakatan bersama kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah.
  4. *Placation*; pemegang kekuasaan (pemerintah) perlu menunjuk sejumlah orang dari bagian masyarakat yang dipengaruhi untuk menjadi anggota suatu badan publik, dimana mereka mempunyai akses tertentu pada proses pengambilan keputusan.
  5. *Consultation*; masyarakat tidak hanya diberi tahu tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat, meskipun tidak ada jaminan bahwa pendapat yang dikemukakan akan menjadi pertimbangan dalam pengambil keputusan.
  6. *Informing*; pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait proposal kegiatan, masyarakat tidak diberdayakan untuk mempengaruhi hasil.
  7. *Therapy*; pemegang kekuasaan memberikan alasan proposal dengan berpura-pura melibatkan masyarakat.
  8. *Manipulation*; merupakan tingkat pasrtisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja
- Dalam Penelitian ini akan dijelaskan bahwasannya Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan dana desa yang dianalisis menggunakan 8 tangga partisipasi Arnstein diatas dibagi menjadi 3 fokus utama, yakni:

*Pertama*, Fokus pada Partisipasi Masyarakat pada proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di desa Sukodermo

Kecamatan Purwosari, *Kedua*, Fokus Pada Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari, dan *Ketiga*, Fokus pada Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi Pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan hasil observasi dan interview dengan beberapa Informan diantaranya:, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Bagian Keuangan Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat didapatkan data sebagai berikut:

#### 4.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari

Suatu kebijakan tidak akan bisa diimplementasikan kecuali adanya jaringan aktor yang terlibat. Semakin banyak jaringan aktor yang terlibat maka semakin besar pula peluang keberhasilan suatu kebijakan tersebut. Semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi maka semakin program-program pembangunan akan semakin maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Lantas siapakah jaringan aktor yang terlibat dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa? selain pihak pemerintah desa, masyarakat pun juga menjadi aktor yang penting untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan dana desa ini.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa mengadakan kegiatan musrembang desa, yang mana dalam kegiatan ini seharusnya di hadiri oleh beberapa aktor seperti RT/RW, Tokoh Masyarakat, Pemuda dari karang taruna, PKK, juga Masyarakat Desa setempat tapi karena masyarakat banyak yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing maka hanya sedikit yang bisa mengikuti musrembang desa ini. Sebelum kegiatan musrembang, pihak Pemerintah Desa sudah menyebarkan undangan kepada setiap elemen-elemen perwakilan masyarakat seperti yang sudah disebut diatas.

Perencanaan dengan model partisipatif dilakukan melalui kegiatan musrembang desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari RT/RW, lembaga masyarakat, tokoh masyarakat juga masyarakat desa. Kegiatan musrembang desa ini bertujuan untuk mengikut sertakan masyarakat dalam merencanakan program-program pembangunan guna kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada kegiatan musrembangdes, pihak Pemerintah Desa memberikan undangan kepada seluruh elemen masyarakat yang sudah disebutkan diatas.

Pada kegiatan musrembang desa ini, telah disusun beberapa tim yang diambil dari tiap dusun guna menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang kemudian diusulkan kepada Pemerintah Desa sehingga menjadi Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan yang dihasilkan adalah gambaran harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, dampak dari partisipasi masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa ini ialah lebih transparansinya Pemerintah Desa terhadap masyarakat dalam setiap program kerja atau bahkan dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Dengan adanya transparansi antara pihak Pemerintah Desa dengan Masyarakat, akan meminimalisir tingkat kecurigaan masyarakat terhadap setiap program pembangunan yang berhubungan dengan Dana Desa.

Kontribusi yang didapat Masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada setiap program pembangunan ialah dapat menikmati sarana dan prasarana yang ada di Desa Sukodermo. Selain itu, masyarakat juga mendapat honor yang diambilkan dari anggaran padat karya. Padat karya ialah program pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang masih pengangguran, janda dll.

Adapun hasil pengamatan dan informasi yang diperoleh peneliti, menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat pada kegiatan musrembangdes dalam proses perencanaan

di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari ini masih tergolong rendah, karena sebagian masyarakat tidak ikut serta dalam proses perencanaan pengelolaan dana desa yaitu berupa kegiatan musrembang desa.

Selain itu, masyarakat juga masih enggan untuk mengetahui lebih dalam tentang apa saja Program Perencanaan Dana Desa. sebagian masyarakat hanya ingin mengetahui apa saja yang sudah dibangun oleh Pemerintah Desa dengan anggaran Dana Desa. Karena masih minimnya tingkat pendidikan, juga dapat mempengaruhi seberapa besar pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Pemerintah khususnya pada Program Pengelolaan Dana Desa.

#### 4.2 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari

Pada tahap pelaksanaan, jaringan aktor yang terlibat pun masih sama yaitu pihak pemerintah desa dengan masyarakat setempat. Seperti ketika pembangunan pavingisasi dilakukan, hanya beberapa masyarakat saja yang ikut andil. Padahal pemerintah desa sudah mengumumkan akan diadakan kerja bakti disepanjang jalan yang akan di paving tapi partisipasi masyarakat masih tergolong rendah.

Masyarakat hanya ingin tahu pemerintah desa mempergunakan dana desa untuk membangun apa saja tanpa ingin mengetahui proses baik itu dari perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai evaluasi pengelolaan dana desa. Mereka beranggapan sudah ada dana untuk tukang dan kulinya jadi buat apa ikut berpartisipasi. Itu adalah bentuk dari masih dangkalnya pemikiran masyarakat disebabkan kurangnya pendidikan yang mereka tempuh.

Partisipasi masyarakat pada tahapan ini menunjukkan bahwa tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa masih tergolong rendah, dimana sebagian masyarakat masih enggan untuk berpartisipasi pada proses pelaksanaan pembangunan. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat salah satunya disebabkan karena masih kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai tanggung jawab mereka atau bahkan tugas-tugas mereka pada setiap proses pembangunan. Yang semestinya peran partisipasi masyarakat pada tahapan ini memantau secara langsung pelaksanaan dari tahapan perencanaan sebelumnya, jadi masyarakat bisa secara langsung melakukan monitoring kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian dilapangan, menunjukkan bahwa masih kurangnya komunikasi antara pihak Pemerintahan Desa dengan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dan pemahaman mengenai tanggung jawab mereka sebagai tim monitoring dari setiap pelaksanaan program pembangunan yang ada di desa itu sendiri. Komunikasi memainkan peran sangat penting dalam tahapan proses implementasi program- program yang sudah ditetapkan pada tahapan perencanaan, partisipasi masyarakat pada tahapan ini sekaligus menjadi kunci kendali implementasi program, baik program pembangunan fisik atau proram pemberdayaan masyarakat.

Melihat dari setiap permasalahan diatas, walaupun tiap program pembangunan dapat terselesaikan dengan cukup baik namun partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pengelolaan dana desa ini masih tergolong rendah. Jika dalam tahapan ini partisipasi masyarakat sangat berperan, maka pada tahapan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa ini akan semakin baik.

#### 4.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari

Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap evaluasi dalam proses pengelolaan dana desa. Pada tahap ini pemerintah desa mengadakan rapat untuk mengevaluasi program pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya. Pemerintah Desa juga mengundang masyarakat desa. tapi tidak banyak masyarakat yang menghadiri rapat evaluasi.

Tidak hanya Pemerintah Desa, Masyarakatpun juga dibutuhkan dalam tahap ini untuk mengevaluasi lagi kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam proses perencanaan juga pelaksanaannya. Identifikasi jaringan aktor yang terlibat memang sangatlah penting karena untuk menunjang keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Tanpa adanya aktor-aktor yang terlibat, suatu kebijakan tidaklah ada artinya.

Partisipasi masyarakat pada tahapan ini menunjukkan bahwa tahap Evaluasi Pengelolaan Dana Desa juga masih sangat rendah. Pihak Pemerintah Desa mengadakan rapat guna mengevaluasi program-program pembangunan. Namun masyarakat juga hanya beberapa saja yang hadir dalam rapat tersebut. Sebagian masyarakat hanya ingin tahu pembangunan apa saja yang dibangun oleh Pihak Pemerintah Desa tanpa ingin tau prosesnya.

Sebenarnya dengan diadakannya rapat evaluasi ini bertujuan untuk meminimalisir tindakan saling curiga antara pihak Pemerintah Desa dengan Masyarakat. akan tetapi masyarakat masih belum memahami perihal tersebut.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di Desa Sukodermo ini, pemahaman sebagian masyarakat mengenai tugas mereka mereka sebagai tim evaluasi masih sangat rendah juga mereka lebih disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga jarang sekali yang mau hadir dalam kegiatan pembanguna desa. Juga kurangnya komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat. Masyarakat hanya ingin tahu anggaran dana desa dipergunakan untuk pembangunan apa saja tanpa ingin mengetahui setiap proses dari pembangunan tersebut.

Selain pemaparan data yang terbagi menjadi 3 fokus diatas, dalam penelitian ini juga mendapat temuan bahwasannya dalam praktik partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sukodermo

ini terdapat dukungan dan hambatan, adapun dukungan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Dukungan bagi pemerintah desa, dengan adanya aspirasi dari warga setempat dan juga rapat penyusunan rencana kegiatan dana desa, pemerintah desa sangat terbantu.
2. Dukungan bagi masyarakat, dengan diadakannya kegiatan musrembang desa, dan juga disusunnya tim-tim disetiap dusun aspirasi-aspirasi masyarakat tertampung oleh pemerintah desa.
3. Dukungan bagi Pemerintah Desa, dengan adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti jalan yang akan di paving itu sangat membantu proses pembangunan.
4. Banyaknya rencana program pembangunan yang diusulkan. Permintaan dan kebutuhan masyarakat disetiap Dusun yang berbeda sehingga banyak masukan yang masuk ke pemerintah desa.
5. Banyaknya rencana program pembangunan yang diusulkan, Permintaan dan kebutuhan masyarakat disetiap Dusun yang berbeda sehingga banyak masukan yang masuk ke pemerintah desa.

Adapun dukungan yang dimaksud sebagai berikut

1. Kurang terjalannya komunikasi dengan baik antara pihak aparat desa dengan masyarakat setempat yang menyebabkan kesalah pahaman dari kedua belah pihak. Selain komunikasi, pihak pemerintah Desa masih kurang sosialisasi mengenai program pengelolaan dana desa itu sendiri
2. Kurangnya pemahaman mengenai tugas-tugas masyarakat sebagai tim evaluasi yang bisa mengakibatkan kecurigaan sepihak. Juga kurangnya kesadaran warga untuk saling gotong

royong dalam setiap pembangunan desa guna kesejahteraan bersama.

3. Kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah desa mengenai kebijakan Dana Desa kepada masyarakat setempat sehingga sebagian masyarakat masih belum paham betul, apa atau bagaimana kebijakan Dana Desa tersebut.
4. Sebagian masyarakat disibukkan dengan pekerjaan masing-masing. Selain itu, mereka berpikir karena sudah ada anggaran untuk tukang dan juga kuli jadi mereka tidak perlu membantu terlalu jauh.
5. Masih minimnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kemajuan Desanya. Hal ini bisa diakibatkan karena masih rendahnya SDM. Yang mana mayoritas penduduk Desa Sukodermo masih didominasi lulusan SD.
6. Masyarakat lebih memilih sibuk dengan kepentingan masing-masing dari pada kepentingan bersama.
7. Pemerintah Desa memprioritaskan kebutuhan yang paling urgen, yang lebih diutamakan. Untuk masukan yang belum di acc membuat masyarakat yang member masukan tersebut sedikit sakit hati

## 5. Kesimpulan Dan Saran

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pada semua fokus penelitian baik pada tahap proses perumusan, pelaksanaan dan evaluasi Dana Desa, partisipasi masyarakat Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari masih rendah keterlibatannya. Jika dikaitkan dengan tangga partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat Desa Sukodermo Kecamatan Purwosari berada pada tangga kedelapan yakni *Manipulation*, yakni merupakan tingkat partisipasi yang paling rendah, dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja.

Implikasi penelitian ini bisa menjadi bahan wacana bagi aktor Pemerintahan Desa agar dalam mengawal Dana Desa bisa lebih baik, karena jika partisipasi masyarakat sangat tinggi maka asas keterbukaan dan transparansi Pemerintahan Desa akan semakin tinggi pula.

### 5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini mengindikasikan pada penelitian selanjutnya agar lebih mendalam dalam proses perencanaan dan Evaluasi Dana Desa.

## 6. Daftar Pustaka

- Anggito, Albi & Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak
- Hasil Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 No. 99/12/Th. XXI, BPS: 2018
- I Wayan Adi Suarnata, et.al. 2017 Kurangnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Manikliyu Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli) e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017)
- Kadji, Yulianto 2015. *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik*. Gorontalo: UNG Press Gorontalo.
- Muluk, Khairul MR. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Noerma, AB. 2017. partisipasi masyarakat dalam pengawasan program alokasi dana desa (add) di desa panjunan, kecamatan sukodono, kabupaten sidoarjo. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, Volume 5, Nomor 3, September – Desember 2017
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Rakhmawati, A., Nizar, M., & Rahardjo, K. (2019, April). Green Supply Chain Management and SME's, A Qualitative Study in Indonesian Marketplace. In *Journal of International Conference Proceedings* (Vol. 2, No. 1).

Sudarto. 1995. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  
Tentang Desa

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa* Jakarta: Raja Grafindo Persada

William N, Dunn. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Yulianti,2003.*Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta: LP3ES